

**ANALISIS PROGRAM PELATIHAN KERJA
(Studi Pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang)**

NASKAH PUBLIKASI



Oleh :

AYAT TERI YANTI

110563201157

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

TANJUNG PINANG

2017

ANALISIS PROGRAM PELATIHAN KERJA (Studi Pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang)

ABSTRAK

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang sebagai unit pelaksana teknis operasional Daerah di lapangan (SK Wali Kota No.146 Tahun 2003) melaksanakan program pelatihan kerja. Program pelatihan kerja adalah salah satu upaya pemerintah menjembatani lulusan pendidikan dengan dunia kerja agar dengan diadakannya pelatihan ini dapat memiliki keterampilan yang mampu meningkatkan kemandirian sehingga mereka mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang sudah diajarkan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang. Dalam penelitian ini, menjabarkan aspek yang terkandung dalam konsep Analisis kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn. Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan *purposive sampling* dengan pertimbangan pegawai yang memiliki pengalaman dan memahami dalam Pelaksanaan program pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang. Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang dengan 1 orang sebagai Informan kunci (*Key Informan*). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis secara deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan memaparkan nilai variabel mandiri yang ditemukan di lapangan, tanpa membandingkan atau menghubungkan dengan variabel lainnya. Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa Indikator Definisi yaitu Masih banyaknya pengangguran di Kota Tanjungpinang sehingga Pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan diadakannya Program Pelatihan Kerja bagi Ibu Rumah Tangga, para pencari kerja atau pengangguran. Dilihat dari Prediksi yaitu Dengan adanya program pelatihan kerja dapat terciptanya SDM yang mandiri, jika dilihat dari Preskripsi yaitu untuk berjalannya suatu program dibutuhkan anggaran agar program dapat berjalan lancar. Dilihat dari Deskripsi yaitu berjalannya Program Pelatihan Kerja oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang dapat meningkatkan jumlah Wirausaha dan pekerja di Kota Tanjungpinang, dengan adanya Evaluasi dapat mengetahui apakah Program ini berjalan atau tidak, dari hasil sebagian Peserta Pelatihan Kerja dapat membuka usaha sendiri dan sebagian lagi dapat bersaing didunia kerja. Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa dengan banyaknya pengangguran di Kota Tanjungpinang, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang melakukan satu kegiatan yaitu Program Pelatihan Kerja yang diambil dari tiap kelurahan yang ada di Kota Tanjungpinang. masukan atau saran dari peneliti yang dapat dijadikan bahan pertimbangan, diharapkan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang akan lebih meningkatkan kinerja dalam memajukan Program Pelatihan Kerja yang akan datang.

Kata kunci : Program, Pelatihan, dan Kerja

ABSTRACT

Social and labor Agency of Tanjungpinang city as a unit implementer of operational technical areas in the field (Decree of the Mayor No : 146 Year 2003) has to implement job training programs. Job training programs is one of the government's efforts in bridging fresh graduates with the working world so that with this training, they could be provided with skills which could increase independence and therefor they could get the job which suitable with the skills that had been taught. As for the purpose of this study is to analyze the job training process organized by social and labor Agency of Tanjungpinang City. In this research, outlines aspects contained in the draft policy Analysis proposed by Dunn. Informant in this study were determined using purposive sampling with consideration employees have experience and understand the implementation of job training programs organized by social and labor agency of Tanjungpinang City. Informants in this study consist of 7 people with 1 as the key informant. Data analysis techniques used in this research is descriptive qualitative analysis techniques, the research has been carried out to find out and display the value of independent variables that were found in the field without comparing or connect with other variables. From the research that researcher do can know that the Definition is there are still many unemployment in Tanjungpinang City, until the Goverment make a policy with make the job coaching Program for house wife, the job seeker or unemployment. Looking from the prediction that with there is the job coaching program can created the Independently Human Resources if looking from for Prescription that run a program we need the estimate for make the program running go. Looking from description that the job coaching program going by Social and labor agency of Tanjungpinang City can increase the entrepreneur amount and employee in Tanjungpinang City, with the Evaluation can know is this Program can go or no From the result of the coaching Participant can make their own effort and the other can complete in working world. The counclusion of this research is with a lot unempeyment in Tanjungpinang City, Social and Labor agency of Tanjungpinang City make a activity that is work coaching Program that take from every urban village in Tanjungpinang City. The input or proposition from researcher can be a judgement, hoping Social and Labor agency of Tanjungpinang will more increase Performance in modernize job coaching program until can help the government in resolve the unemployment matter and increase the region Economy.

Keywords : Program, Training, and Work

A. Pendahuluan

Dalam era globalisasi, persaingan kerja sangat ketat. Tenaga kerja yang terampil dan mempunyai keahlian merupakan suatu syarat untuk dapat bersaing memasuki dunia kerja.

Sehubungan dengan permintaan dunia kerja terhadap tenaga kerja yang terampil dan mempunyai kualitas tenaga kerja yang tinggi maka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya tenaga kerja dilakukan melalui berbagai jalur diantaranya melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan keterampilan di tempat kerja.

Bidang tenaga kerja diprioritaskan untuk perluasan kesempatan kerja melalui penyebaran informasi dan perencanaan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan berusaha, pemagangan dan pelatihan, kelembagaan, pengawasan dan perlindungan serta peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang menjadi fasilitator untuk menyelenggarakan pelatihan kerja yang untuk

mengembangkan program-program pelatihan kerja dengan sasaran ibu rumah tangga, pemuda putus sekolah, pengangguran atau bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang direkomendasikan oleh setiap kelurahan yang ada di Tanjungpinang untuk membekali mereka dengan keahlian khusus dan keterampilan agar dapat bekerja sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, pembinaan dan pelatihan merupakan program dari lembaga pemerintah untuk dapat meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan kerja setiap tahunnya seperti UUD pasal 27 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "*Warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*" sehingga dapat terwujud masyarakat yang makmur.

Tujuan dan sasaran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan adalah dapat meningkatkan SDM yang berkompeten sehingga dapat bersaing di dunia kerja maupun membuka lapangan pekerjaan sehingga dapat

mengurangi jumlah pengangguran. Program pelatihan bersifat mandiri yaitu diberikan uang saku, alat dan perlengkapan kepada setiap peserta agar memudahkan dalam pelaksanaan pelatihan. Peserta yang diambil adalah masyarakat dari setiap Kelurahan yang ada di Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap pelaksanaan Program Pelatihan Kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga kerja Kota Tanjungpinang ditemukan beberapa fenomena yang terjadi di lapangan antara lain sebagai berikut:

1. Peserta tidak disiplin sehingga waktu yang disediakan tidak maksimal.
2. Pendidikan yang didapatkan dengan waktu yang singkat tidak menjamin materi yang diajarkan dapat diserap dengan baik oleh para peserta, karena pelatihan diadakan 7 sampai 20 Hari dengan waktu 6 sampai 8 Jam.
3. Dalam satu hari materi dipadatkan hingga 3 materi sekaligus ini membuat banyak

peserta mengeluh tidak dapat menyerap materi dengan baik.

4. Kecilnya Anggaran yang diterima untuk melaksanakan Program Pelatihan Kerja ini.

Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Analisis Program Pelatihan Kerja Oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang”.

B. Landasan Teori

1. Penelitian Terdahulu yang relevan

Penelitian oleh Rahmad Aditya Pratama Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu S Sosial dan Politik di Universitas Maritim Raja Ali Haji pada Tahun 2016 dengan Judul “Implementasi Kebijakan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam menanggulangi Pengangguran di Kota Tanjungpinang.

Penelitian ini membahas tentang Implementasi Kebijakan dalam bentuk Pelatihan Kerja. Hasil penelitian tersebut menunjukkan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah

dalam bentuk menanggulangi pengangguran adalah dengan memberikan pelatihan kerja untuk mengembangkan potensi masyarakat serta produktifitas masyarakat. Penelitian ini melihat dari segi Adanya Program atau Kebijakan yang dilaksanakan, Kelompok sasaran, dan Unsur Pelaksanaan (*Implementor*)

Berdasarkan tinjauan diatas, tampak bahwa penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian yang sudah ada. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam yang mempunyai tujuan yang sama yaitu menanggulangi pengangguran maka peneliti mengambil tentang Program Pelatihan Kerja oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di Kota Tanjungpinang.

2. Kebijakan Publik

Kettl dalam Nugroho (2008:99) mengemukakan bahwa memasuki milenium ketiga, administrasi publik menghadapi tiga isu kritikal, yaitu berkenaan dengan struktur administrasi

publik dengan tantangan menguatnya swasta dan menyusutnya pemerintahan. Proses administrasi publik yang memperhadapkan kenyataan bahwa sumber defisit terbesar di setiap negara adalah proses penyelenggaraan administrasi publik.

Kebijakan Publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintahan yang tertulis dalam bentuk peraturan perundangan dan peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati, yang disebut konvensi-konvensi. Peraturan tertulis mudah diamati dan dipahami. Lewi dalam Nugroho (2008:105) membagi amatan kebijakan publik menjadi dua, yaitu yang berkenaan dengan substansi dan yang berkenaan dengan prosedur.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan data kualitatif, yaitu berusaha mencari fakta-fakta yang terjadi yang disesuaikan dengan ruang lingkup

penelitian yang dipaparkan secara jelas mengenai suatu fenomena sosial yang terjadi di masyarakat.

Menurut Sugiyono (2009:6) bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri yaitu tanpa perbandingan atau menggabungkan dengan variabel lain.

Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang karena dalam tugas dan fungsi pokok yang dikemukakan bahwa salah satu kewajiban dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang adalah memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam bentuk penyelenggaraan pelatihan kerja.

Data yang dapat bersumber dari Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang serta dari proses wawancara yang dilaksanakan oleh penulis. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data primer dan Data sekunder.

Dalam penelitian ini tidak menggunakan sampel melainkan Informan. Penentuan Informan sebagai sumber data dilakukan

dengan teknik *purposive*. Sugiyono (2009:216) menyebutkan *purposive* adalah penentuan sumber data yang dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Untuk memperoleh data, peneliti menetapkan *Informan* yang berjumlah 5 orang dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yaitu terdiri dari 1 orang Informan Kunci (*Key Informan*) yaitu Kepala Bidang serta 4 Orang *Informan*. Ditambah 2 orang dari Masyarakat yang mengikuti Program Pelatihan. Adapun yang menjadi pertimbangan peneliti adalah orang yang dijadikan *Informan* adalah pegawai yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang memahami Program pelatihan kerja di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang serta Masyarakat yang mendapatkan pelatihan sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi subjek yang sedang diteliti.

D. Pembahasan

Analisis Hasil data yang didapatkan di lapangan. melalui teori yang digunakan peneliti, yaitu Teori Dunn dalam Nugroho (2008:132) Analisis kebijakan adalah aktivitas

intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, dan mengomunikasikan pengetahuan tentang dan dalam proses kebijakan.

Menurut Dunn metode analisis kebijakan menggabungkan lima prosedur umum yang lazim dipakai dalam pemecahan masalah manusia, yaitu Definisi, Prediksi, Preskripsi, Deskripsi dan Evaluasi.

Adapun didalam penelitian Program Pelatihan Kerja ini ada beberapa jenis pelatihan antara lain :

1. Menjahit tingkat dasar

Belajar untuk mengenal mesin jahit, perlengkapan menjahit dan mengetahui fungsi dari bagian-bagian mesin jahit yang akan digunakan. Pelatihan ini berguna untuk mendapatkan pengetahuan dasar bagi peserta pelatihan agar bisa menjahit dengan benar.

2. Salon kecantikan rambut dan kulit

Program pelatihan salon kecantikan rambut dan kulit merupakan suatu program yang sangat penting, dari program tersebut bisa menghasilkan ahli kecantikan rambut dan kulit.

Program ini dibuat untuk membekali setiap peserta agar memiliki sikap, pengetahuan dan kemampuan dalam merawat wajah, merias wajah panggung dan tata rias sanggul.

3. Digital Printing

Digital printing merupakan kebutuhan bagi masyarakat, seperti cetakan foto dari ponsel maupun kamera yang dicetak pada kertas Foto, Kaos dan Tas. Dengan adanya Program Pelatihan Kerja Digital Printing peserta dapat mengetahui teknik komputer dan keterampilan bagi peserta dalam bidang cetak Foto digital.

4. Disain Grafis

Program Pelatihan Disain Grafis ini menjadi salah satu program yang mampu membawa dampak positif kedepan bagi pertumbuhan masyarakat. Dengan program ini dapat meningkatkan SDM yang mampu bersaing di dunia kerja maupun usaha.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan bagian terpenting bagi sebuah organisasi, penggerak utama

dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan suatu organisasi.

Didalam suatu kegiatan dapat dikatakan berhasil jika proses dan evaluasi bisa berjalan dengan baik. Proses dan evaluasi pelaksanaan program pelatihan kerja dapat dilakukan guna mencapai tujuan organisasi.

Untuk mengetahui proses dan evaluasi berjalan atau tidaknya program pelatihan kerja dapat dilihat dari dimensi sebagai berikut :

a. Definisi

Dari hasil dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar, sehingga kebijakan Program Pelatihan Kerja ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah dengan banyaknya jumlah pengangguran kerja di Kota Tanjungpinang maka program pelatihan kerja sangat membantu pemerintah dalam pengembangan dan peningkatan mutu sumber daya manusia dari program tersebut dapat menghasilkan masyarakat yang mandiri sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan

atau dapat bekerja sesuai dengan keahlian yang diajarkan.

b. Prediksi

Dari hasil yang didapat dari Informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini mampu meningkatkan sumberdaya manusia didalam dunia kerja dengan berpedoman pada UUD ketenagakerjaan dan kesejahteraan rakyat, dengan mengikuti pelatihan kerja yang dilatih oleh pelatih yang sudah teruji kompetensinya diharapkan dapat meningkatkan kemampuan diri peserta sehingga hasil dari pelatihan peserta bisa ditempatkan di dunia kerja seperti perusahaan, industri maupun berwirausaha.

c. Preskripsi

Dari hasil yang diterima peneliti berdasarkan informan diatas dapat disimpulkan bahwa hambatan-hambatan didalam pelaksanaan program pelatihan kerja oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang yaitu masih terbatasnya Anggaran yang didapat sehingga waktu

pelaksanaan kegiatan kurang maksimal.

d. Deskripsi

Dari beberapa penjelasan informan diatas dapat disimpulkan bahwa Penyelenggaraan Pelatihan Kerja oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja ini dapat berjalan dengan baik dengan adanya kerja sama dari pihak sekolah maupun pihak usaha seperti perindustrian maupun dukungan dari Dinas Pendidikan dan BLK Kota Tanjungpinang.

e. Evaluasi

Dengan adanya evaluasi dapat mengetahui hasil dari program pelatihan kerja, evaluasi ini bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses pengambilan kebijakan yang akan datang agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Pembahasan analisis dari hasil peneltian diatas yaitu Dengan banyaknya jumlah pengangguran di Kota Tanjungpinang berjumlah 5.370 orang dan sedikitnya

keterbukaan lapangan kerja maka Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang membuat salah satu Program yaitu Program Pelatihan Kerja bagi masyarakat kota Tanjungpinang yang tidak bekereja atau Ibu Rumah Tangga pada tahun 2015. Kesimpulan yang dapat peneliti uraikan yaitu berdasarkan hasil penelitian bahwa Program Pelatihan Kerja dapat memberikan manfaat, baik untuk peserta maupun pelaksana Program. Berdasarkan pernyataan Informan terhadap proses pelatihan kerja dalam penelitian ini adalah mengenai Dasar Kebijakan Program Pelatihan Kerja, *Rekrutmen* peserta, Peningkatan Sumber Daya Manusia, Nilai Anggaran, Hambatan-hambatan, Kebijakan waktu pelaksanaan, dan Evaluasi setelah kegiatan dilaksanakan. Program Pelatihan Kerja bertujuan membantu para pencari kerja, Ibu Rumah Tangga atau Pengangguran dapat memberikan keahlian

sehingga dari hasil program tersebut dapat menanggulangi pengangguran yang ada di Kota Tanjungpinang. Proses Kegiatan Pelatihan yang sudah dilaksanakan perlu dilakukan perbaikan lagi seperti Anggaran yang dibutuhkan lebih ditambah, haru lebih Transparansi didalam penerimaan Peserta Pelatihan.

E. Penutup

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Analisis Program Pelatihan Kerja oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang. Dapat disimpulkan bahwa Program pelatihan kerja adalah salah satu upaya pemerintah menjembatani lulusan pendidikan dengan dunia kerja agar dengan diadakannya pelatihan ini dapat memiliki keterampilan sehingga mereka mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang mereka dapatkan. Pelatihan yang dimaksud untuk peningkatan tenaga kerja serta perluasan lapangan usaha. Berdasarkan Teori yang dipakai oleh Peneliti menurut Dunn dalam Nugroho (2008 : 132) yaitu Definisi,

Prediksi, Preskripsi, Deskripsi, dan Evaluasi dapat disimpulkan bahwa:

1. Definisi dari program pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dilihat dari, Masih banyaknya pengangguran di Kota Tanjungpinang sehingga Pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan diadakannya Pelatihan Kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang guna membantu ibu rumah tangga dan para pencari kerja atau pengangguran di Kota Tanjungpinang.

2. Prediksi dari program pelatihan kerja dilihat dari, dengan adanya Program Pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dapat terciptanya SDM yang mandiri sehingga dari pelatihan kerja yang diikuti oleh peserta dapat bersaing didunia kerja maupun dapat membuka lapangan pekerjaan. Program pelatihan ini adalah salah satu upaya membantu pemerintah dalam

meningkatkan perekonomian penduduk dan mengurangi pengangguran.

3. Preskripsi dilihat dari, suatu kegiatan dalam hal ini Program pelatihan kerja harus memiliki dana yang dibutuhkan untuk berjalannya suatu program tersebut, anggaran yang tidak sesuai kebutuhan kegiatan akan menimbulkan masalah seperti tidak efektifnya kegiatan dengan demikian untuk menunjang keberhasilan kegiatan Pelatihan Kerja ini membutuhkan anggaran sesuai dengan yang diperlukan.

4. Deskripsi dilihat dari, berjalannya Program Pelatihan Kerja oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang dapat meningkatkan Jumlah Wirausaha dan pekerja di Kota Tanjungpinang, Minimal setengah Dari peserta pelatihan dapat bekerja atau membuka usaha sendiri.

5. Evaluasi dilihat dari, pelajaran dan pengalaman selama pelatihan dapat diterapkan, Hasil evaluasi Program Pelatihan Kerja

yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja tersebut sebagian Peserta pelatihan dapat membuka usaha mandiri dan mendapatkan pekerjaan dan sedikit yang belum bekerja.

Berdasarkan penelitian yang didapatkan peneliti di lapangan, maka peneliti akan memberikan masukan dan saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan, diharapkan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang akan lebih meningkatkan kinerja dalam memajukan Program Pelatihan Kerja yang akan datang. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Indikator Definisi

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang dapat membuat kerangka acuan dalam melaksanakan Program Pelatihan Kerja sehingga memberikan pemahaman kepada masyarakat yang ingin mengikuti Program Pelatihan Kerja.

2. Indikator Prediksi

Lebih transparansi didalam penerimaan Peserta Pelatihan Kerja.

3. Indikator Preskripsi

Anggaran yang disediakan untuk Program ini lebih ditingkatkan sehingga waktu pelaksanaan Pelatihan dapat berjalan lebih lama dan jumlah peserta dapat ditambah.

4. Indikator Deskripsi

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja agar lebih memperhatikan sarana dan Fasilitas pada saat pelatihan karena sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan Program tersebut.

5. Indikator Evaluasi

Pelaksanaan Pelatihan Kerja yang sudah berjalan sebaiknya lebih ditingkatkan lagi, Karena masih adanya peserta pelatihan yang setelah mengikuti belum dapat membuka usaha sendiri sesuai harapan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang, Sehingga hal ini patut diperhatikan untuk memperbaiki pelaksanaan Program Pelatihan Kerja selanjutnya.

F. Daftar Pustaka

Buku

Atmodiwirio, Soebagio, 2002, *Manajemen Pelatihan*, Jakarta: Pt. Ardadizya Jaya.

Djogo, T, Sunaryo, Suharjito D, dan Sirait M. 2003. *Kelembagaan dan Kebijakan dalam Pengembangan Agroforestri*. ICRAF. Bogor

Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta

Hasibuan, Malayu, S.P, *Manajemen Sumber Daya Manusia Cetakan Kesembilan*, Jakarta: Bumi Aksara

Irawan, Prasetya, 2007, *Metode Penelitian Administrasi*, Jakarta : Universitas Terbuka.

Iskandar, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Jakarta : Gaung Persada Press

Moleong, J Lexy, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Nazir, Moh, 1998, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Nugroho, Riant, 2008, *Public Policy*, Jakarta : Elex Media Komputindo.

Subarsono, AG, (2006). Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono, 2003, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta.

Sumarsono, Sonny, 2009, *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Tjiptono, Fandy & Anatasia, Diana, 2003, *Perilaku Kontemporer*, yogyakarta: Andi Offset.

Winarno, Budi. (2014). Kebijakan Publik, Teori, Proses Studi Kasus: Centre for academic Publishing Service: Yogyakarta.

Widodo, Joko. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Penerbit Media Pressindo. Yogyakarta

Surat Keputusan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 146 Tahun 2003 Tentang Unit Pelaksanaan Teknis Operasional Daerah Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang.

Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional Di Daerah Tentang Peningkatan Kualitas SDM, Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Dan Pembangunan Ketenaga Kerjaan Indonesia.

Prayitno, Didit. 2008. Tesis Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi kebijakan pemerintah : (Studi kasus pelaksanaan program wajib belajar Sembilan tahun di Distrik Semangga, kabupaten Maraoke) Malang : Universitas Diponegoro

Dokumen

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Internet

Anharudin.2007. *Memahami Proses Pengambilan Kebijakan Publik*

[.http://www.nakertrans.go.id/hasil_penelitiantrans/kebijakan_public.php](http://www.nakertrans.go.id/hasil_penelitiantrans/kebijakan_public.php)- 64k. 4 oktober 2007

<http://www.sagepublications.com>
The Policy Implementation Process : A Conceptual Framework Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn *Administration & Society* 1975 6: 445.

